



**Pendidikan Politik Berbasis Desa Wisata:
Analisis Kritis Partisipasi Warga dalam Tata Kelola Budaya di Ponorogo**

Fety Fitriana Hertika ^{✉ 1}, Ardhana Januar Mahardhani ^{✉ 2}, Sulton ^{✉ 3}

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima : Juni 2025 Revisi : Juni 2025 Dipublikasikan : Juli 2025</p>	<p>Studi ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan politik yang ada dalam implementasi pengelolaan desa wisata berbasis budaya di Ponorogo, serta merancang model partisipasi yang lebih demokratis dan mendidik untuk pengelolaan warisan budaya lokal. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen di desa wisata yang mengelola atraksi budaya Reog. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa desa wisata berperan sebagai tempat pendidikan politik yang memperkuat kemampuan musyawarah, pemahaman hukum dan kewarganegaraan, kesadaran kritis terhadap pembagian kekuasaan, serta kemampuan kolaboratif warga. Keterlibatan masyarakat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari partisipasi yang bersifat simbolis hingga konsultatif, dengan kelompok seni dan pemuda memainkan peran penting sebagai jembatan antara warga dan pemerintah desa. Walaupun begitu, ketidaksetaraan dalam akses partisipasi dan dominasi aktor tertentu masih menghambat demokratisasi proses pengelolaan budaya. Studi ini memperkenalkan model partisipasi demokratis-edukatif yang mencakup ruang musyawarah terbuka, peningkatan kemampuan politik masyarakat, sistem akuntabilitas sosial, serta pengintegrasian nilai budaya lokal sebagai landasan pengelolaan. Kesimpulannya, desa wisata berfungsi sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus laboratorium demokrasi lokal yang mampu memperkuat pendidikan politik masyarakat dengan dukungan tata kelola yang transparan dan partisipatif.</p>
<p>Keywords : Demokrasi Lokal; Desa Wisata; Partisipasi Warga; Pendidikan Politik; Tata Kelola Budaya</p>	<p>ABSTRACT <i>Village Tourism Based Political Education: A Critical Analysis of Citizen Participation in Cultural Governance in Ponorogo.</i> This research intends to examine the types of political education arising in the culture-driven governance of tourism villages in Ponorogo and to create a more democratic and educational participation framework for overseeing local cultural heritage. Utilizing a qualitative case study approach, information was gathered via detailed interviews, participant observation, and document analysis within tourism villages that oversee Reog cultural sites. The results indicate that tourism villages serve as platforms for political education that enhance citizens' deliberative abilities, legal and civic knowledge, critical understanding of power dynamics, and teamwork skills. Citizen participation exists on various levels, from symbolic to consultative engagement, with cultural organizations and youth groups acting as important links between residents and village officials. Nonetheless, unequal opportunities for participation and the prevalence of certain actors continue to limit the democratization of cultural governance. This research suggests a participatory model for democratic education that includes inclusive deliberative environments, programs for enhancing political skills, mechanisms for social accountability, and the incorporation of local cultural values as the basis for governance. In summary, tourism villages function not just as venues for cultural preservation but also as local democratic experiments that can improve political education when bolstered by transparent and inclusive governance frameworks.</p>
<p>How to Cite : Hertika, F. F., Mahardhani, A. J., Sulton, S. (2025). Pendidikan Politik Berbasis Desa Wisata: Analisis Kritis Partisipasi Warga dalam Tata Kelola Budaya di Ponorogo. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 10(2), pp. 195-201. DOI: https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.12900</p>	<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo^{1,2,3}, Magister Pedagogi, Ponorogo dan Indonesia ✉ E-mail: fetyfitrianhertika@gmail.com¹; ardhana@umpo.ac.id²; sulton@umpo.ac.id³</p>

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada komunitas dan program desa wisata telah menjadi strategi utama bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan (Mahardhani et al., 2023), memberdayakan masyarakat desa, serta melestarikan nilai-nilai budaya setempat. Penyusunan kebijakan desa wisata dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pemanfaatan potensi alam dan budaya desa, termasuk atraksi, fasilitas, dan aksesibilitas agar memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam meraih keuntungan ekonomi sekaligus melestarikan identitas lokal. Pendekatan desa wisata yang ideal tidak hanya fokus pada aspek ekonomi saja, tetapi juga mengedepankan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sebagai kunci keberlanjutan, serta sebagai wadah praktik demokrasi lokal dan pendidikan politik sehari-hari bagi komunitas (Yanes et al., 2019).

Keadaan di Kabupaten Ponorogo menunjukkan pengembangan destinasi yang berfokus pada budaya terutama yang berhubungan dengan seni Reog menjadikan soal pengelolaan budaya dan keterlibatan masyarakat sebagai isu utama (Argiandini et al., 2023; Atiek Rohmiyati & Rachmawaty, 2023). Kabupaten Ponorogo telah mengeluarkan peraturan dan panduan mengenai pengelolaan desa wisata yang menggambarkan fungsi ruang desa sebagai tujuan wisata dan tanggung jawab pemangku kepentingan lokal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 4 tahun 2021 tentang Desa Wisata, sementara upaya pelestarian Reog saat ini menjadi perhatian dalam kajian akademik serta kebijakan daerah karena nilai budaya dan identitasnya yang mendalam (Sahri, 2021). Pelaksanaan pengelolaan pariwisata budaya di berbagai desa di Ponorogo menunjukkan adanya gabungan tindakan komunitas, fungsi pemerintah desa, serta intervensi pihak lain (seperti lembaga, padepokan, dinas kebudayaan), tetapi pola partisipasi dan distribusi kekuasaan dalam tata kelola tersebut masih berbeda-beda dan kadang belum menjamin inklusi masyarakat secara demokratis mengenai bagaimana proses pembelajaran politik informal terjadi melalui aktivitas pengelolaan desa wisata.

Tinjauan penelitian sebelumnya mengungkapkan dua garis besar temuan yang relevan namun belum terintegrasi dengan baik: literatur mengenai desa wisata dan pariwisata berbasis masyarakat secara konsisten

menekankan aspek pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata desa; studi-studi lokal (termasuk kajian tentang pengelolaan desa wisata dan pemberdayaan komunitas) menekankan strategi pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola berbasis komunitas sebagai kunci keberhasilan (Anwar et al., 2023; Pramudiana et al., 2024). Sebaliknya, penelitian Maulana et al. (2024) dan Utami et al. (2021) tentang Reog dan konservasi warisan budaya di Ponorogo seringkali lebih menitikberatkan pada aspek legal-administratif, identitas politik, atau usaha pelestarian seni tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan proses pendidikan politik warga yang terjadi melalui praktik pengelolaan pariwisata budaya. Secara lebih spesifik, masih jarang penelitian yang secara terstruktur mengkaji desa wisata sebagai tempat pendidikan politik mengamati bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan budaya mengubah sikap, pengetahuan, dan kemampuan politik mereka pada tingkat mikro.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dua disiplin: (a) pendekatan pendidikan politik/pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dipelajari dalam konteks sekolah dan lembaga masyarakat; serta (b) penelitian tentang tata kelola desa wisata/pengelolaan warisan yang selama ini lebih fokus pada aspek ekonomi dan konservasi budaya. Studi ini memberikan sumbangan secara nyata dan konseptual dengan mendokumentasikan indikator pendidikan politik yang muncul dari praktik pengelolaan budaya di desa wisata Ponorogo, serta merekomendasikan model partisipasi yang lebih demokratis dan edukatif untuk pengelolaan warisan budaya lokal.

Dalam konteks pendidikan politik, area desa wisata memiliki potensi untuk berperan sebagai “sekolah” praktik politik secara mikro yaitu lokasi di mana masyarakat dapat mempelajari hak, tanggung jawab, negosiasi kepentingan, mekanisme akuntabilitas, dan prosedur pengambilan keputusan secara kolektif. Penelitian ini menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan budaya di desa wisata (terutama yang berkaitan dengan Reog dan atraksi budaya lainnya di Ponorogo) yang mencakup unsur-unsur pendidikan politik seperti proses sosialisasi politik, pengembangan kapasitas masyarakat untuk ikut serta dalam kebijakan lokal, dan penanaman nilai-nilai kewarganegaraan. Tujuan penelitian dirumuskan yaitu: (1) mengetahui

indikator pendidikan politik melalui partisipasi warga dalam tata kelola desa wisata; (2) menganalisis dinamika partisipasi warga dan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan budaya; dan (3) merekomendasikan model partisipasi demokratis-eduksi untuk tata kelola warisan budaya.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus (Pahleviannur et al., 2022) untuk memahami secara mendetail dinamika pendidikan politik yang muncul dalam praktik partisipasi masyarakat pada pengelolaan desa wisata berbasis budaya di Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam dengan perangkat desa, pengelola desa wisata, tokoh budaya (pelaku Reog), kelompok pemuda, dan warga baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, untuk memahami pengalaman, persepsi, dan proses belajar politik yang mereka alami; (2) observasi partisipatif terhadap kegiatan pengelolaan wisata budaya seperti rapat desa, latihan seni, pertunjukan, forum musyawarah, dan agenda pengembangan atraksi, untuk menangkap interaksi sosial, distribusi peran, serta pola komunikasi politik yang terjadi secara alami; dan (3) analisis dokumen yang meliputi regulasi desa wisata, peraturan desa, notulen musyawarah desa, rancangan pengembangan atraksi budaya, serta dokumen kebijakan daerah tentang pelestarian budaya Ponorogo.

Informan ditentukan melalui *purposive sampling* dan didukung dengan *snowball sampling* untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai variasi aktor serta pengalaman politik masyarakat. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, sementara analisis data dilaksanakan dengan model interaktif Huberman & Miles (2012) yang terdiri dari tahap pengurangan data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Segenap tahapan penelitian dilakukan dengan etika melalui persetujuan yang diinformasikan, menjaga kerahasiaan identitas informan, serta memastikan keberadaan peneliti tidak mengganggu praktik budaya atau proses pengelolaan di desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Pendidikan Politik melalui Partisipasi Warga dalam Tata Kelola Desa Wisata

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang musyawarah desa berfungsi sebagai awal munculnya indikator pendidikan politik bagi masyarakat, terutamanya melalui partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan penetapan agenda pengembangan atraksi budaya. Penduduk yang ikut serta dalam forum musyawarah melaporkan bahwa mereka mulai mengerti mekanisme dasar pengambilan keputusan, dinamika komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok seni, serta cara menyampaikan aspirasi secara resmi. Temuan ini sejalan dengan konsep keterampilan sosial masyarakat yang dijelaskan oleh Verba (Hodriani et al., 2025), bahwa ruang kebebasan lokal berperan sebagai sarana pembelajaran politik yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kemampuan berdialog, bernegosiasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

Indikator lain yang ditemukan adalah bertambahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya. Penduduk yang terlibat sebagai pengelola atraksi atau anggota kelompok seni mengaku mulai menyadari batas kewenangan, tanggung jawab administratif, serta dampak hukum dalam pelaksanaan kegiatan budaya. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan budaya di desa wisata berkontribusi pada pendidikan kewargaan yang berkaitan dengan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Firman et al. (2024) bahwa pengalaman praktis dalam mengelola kegiatan sosial dapat meningkatkan pemahaman warga tentang prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kewarganegaraan. Temuan ini menegaskan bahwa desa wisata bukan hanya tempat wisata, tetapi juga menjadi sarana pendidikan hukum untuk masyarakat.

Observasi juga menunjukkan bahwa kapasitas kritis masyarakat bertambah seiring dengan partisipasi mereka dalam penilaian kegiatan wisata budaya, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan Reog dan pengelolaan ekonomi pariwisata. Masyarakat mulai mempertanyakan ketidaksetaraan peran antarpihak, kejelasan alokasi dana, serta keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan warisan budaya. Pola ini menunjukkan unsur kesadaran politik kritis sebagaimana dijelaskan dalam teori Freire (Nadlir & Zamzami, 2023), bahwa tindakan sosial yang reflektif mampu membangun kesadaran kritis terhadap sistem kekuasaan. Dalam konteks desa wisata, kritik dari warga tidak hanya ditujukan kepada pemerintah desa, tetapi juga kepada kelompok

seni atau aktor lokal lainnya yang memiliki pengaruh signifikan.

Selain itu, studi menunjukkan bahwa interaksi masyarakat dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, komunitas pemuda, dan seniman menghasilkan keterampilan kolaboratif yang merupakan indikator penting pendidikan politik. Kemampuan ini tampak dalam pembagian pekerjaan, koordinasi teknis kegiatan budaya, dan resolusi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kajian tentang tata kelola kolaboratif (Mahardhani, 2023), keahlian ini disebut sebagai modal sosial yang mendukung kolaborasi antar pihak dan mendorong pengambilan keputusan bersama yang lebih inklusif. Hasil riset di Ponorogo menunjukkan bahwa praktik budaya dapat membangun keterampilan individu dalam berkolaborasi antar kelompok, yang pada gilirannya memperkuat budaya politik yang partisipatif.

Keseluruhan temuan bagian ini menunjukkan bahwa desa wisata di Ponorogo secara empiris menghasilkan empat indikator utama dalam pendidikan politik: keterampilan diskusi, pengetahuan tentang kewarganegaraan dan hukum, kesadaran kritis mengenai pengelolaan, serta keterampilan kolaborasi sosial-politik. Keempat indikator itu menunjukkan bahwa pengelolaan warisan budaya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran politik yang memperkuat kemampuan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan lokal. Ini juga memperluas pemahaman mengenai pendidikan politik sebagai suatu proses yang tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melalui praktik budaya dalam ruang komunitas

Dinamika Partisipasi Masyarakat dan Distribusi Kekuasaan dalam Pengelolaan Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata bersifat bertahap dan berjenjang, dimulai dari partisipasi informatif hingga partisipasi konsultatif, sedangkan bentuk partisipasi kemitraan hanya muncul di desa yang sudah berkembang dalam pengelolaan wisata. Struktur ini sesuai dengan *Arnstein's Ladder of Citizen Participation* (Varwell, 2022) yang menggambarkan bahwa partisipasi tidak selalu setara dan sering kali terjadi dalam bentuk kompromi antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Keadaan di Ponorogo ditemukan

bahwa penduduk kerap terlibat dalam aktivitas teknis seperti persiapan pertunjukan Reog, namun belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.

Namun, terungkap pola bahwa kelompok seni, komunitas pemuda, dan pengelola pariwisata budaya berperan sebagai penghubung yang memperluas partisipasi masyarakat. Kelompok ini kerap membentuk aliansi tak resmi yang mendorong pemerintah desa agar menyediakan ruang dialog yang lebih besar, seperti dalam penentuan jadwal festival, penggunaan anggaran pariwisata, atau perancangan program pelestarian Reog (Maulidy et al., 2023; Rohmiyati & Rachmawaty, 2023). Fenomena ini memperkuat teori *network governance* yang menegaskan signifikansi hubungan horizontal antar-aktor dalam meningkatkan praktik demokrasi lokal (Sørensen & Torfing, 2016). Dengan kata lain, kekuasaan di level desa tidak hanya terletak pada struktur resmi, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan informal yang berkembang di dalam komunitas budaya.

Hasil pengamatan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam akses partisipasi yang sering dipengaruhi oleh status sosial, hubungan dengan perangkat desa, atau posisi di dalam kelompok seni. Orang-orang yang mempunyai peran penting dalam kelompok Reog biasanya lebih sering diundang ke rapat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dibanding anggota biasa. Ketimpangan ini sejalan dengan tulisan Dacombe & Parvin (2021) mengenai modal politik, yang menunjukkan bahwa partisipasi sering dipahami sebagai hak yang tidak setara bagi semua warga. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berkembang dari praktik desa wisata masih menghadapi tantangan dari struktur kekuasaan lokal yang belum sepenuhnya demokratis

Sebaliknya, pelaksanaan acara budaya seperti pertunjukan Reog secara berkala menciptakan kesempatan interaksi masyarakat yang memperkuat partisipasi simbolik warga. Keterlibatan ini mencakup masyarakat dengan dukungan sosial, partisipasi fisik, hingga sumbangan material untuk pelaksanaan kegiatan. Walaupun tidak selalu bersifat deliberatif, partisipasi simbolik ini tetap memiliki nilai pendidikan politik karena memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas dan warisan budaya. Pandangan ini selaras dengan teori kewargaan budaya yang menegaskan bahwa ekspresi budaya merupakan elemen dari praktik kewargaan yang

membangun identitas dan solidaritas bersama (Zarycki et al., 2021).

Secara keseluruhan, dinamika keikutsertaan masyarakat di desa wisata Ponorogo mencerminkan kompleksitas hubungan antara struktur formal pemerintah desa dan struktur sosial budaya komunitas. Praktik partisipatif yang muncul di tingkat lokal tidak sepenuhnya bebas dari struktur kekuasaan, namun tetap menawarkan ruang untuk pembelajaran politik. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan budaya yang baik memerlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada pemberdayaan teknis, tetapi juga distribusi akses partisipasi dan sistem akuntabilitas yang lebih jelas. Sehingga desa wisata memiliki kemampuan besar sebagai laboratorium demokrasi lokal, namun masih membutuhkan perbaikan agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan lebih setara

Model Partisipasi Demokratis-Edukatif untuk Tata Kelola Warisan Budaya

Berdasarkan hasil empiris, studi ini menawarkan model partisipasi demokratis-edukatif yang menjadikan desa wisata sebagai tempat belajar bersama bagi masyarakat. Model ini berasal dari pemikiran bahwa pendidikan politik dapat timbul dari pengalaman langsung masyarakat dalam mengelola aktivitas budaya, sejalan dengan teori pembelajaran eksperimental (Rahmi, 2024). Dalam lingkungan Ponorogo, pengalaman masyarakat dalam diskusi, pengaturan acara, serta penilaian pelestarian Reog menjadi ilustrasi bagaimana kegiatan budaya dapat membentuk pemahaman politik yang nyata. Dengan demikian, model partisipasi harus mencakup elemen refleksi, dialog, dan pembagian peran yang tegas.

Model yang diajukan menekankan signifikansi dari struktur dialog kebebasan yang lebih terbuka dengan memastikan beragam kelompok termasuk kelompok perempuan, pemuda, masyarakat yang tidak terlibat dalam komunitas seni, dan pelaku budaya kecil juga memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan harapan. Prinsip ini merujuk pada gagasan demokrasi deliberatif oleh Habermas dan Gutmann & Thompson (Kangei et al., 2018), yang menegaskan bahwa mutu dialog publik menentukan mutu hasil dari pengambilan keputusan. Penerapannya di desa wisata bisa berupa pertemuan bulanan, sistem partisipasi digital, atau forum khusus untuk kelompok yang terpinggirkan.

Elemen yang kedua dalam model ini adalah peningkatan kapasitas politik masyarakat

melalui program pelatihan manajemen budaya, pemahaman hukum, serta pelatihan komunikasi publik. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat tetap bervariasi, sehingga diperlukan intervensi terencana yang memperkuat keterampilan kolaborasi, advokasi, dan penyelesaian konflik. Ide ini sejalan dengan pandangan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat sebagai syarat partisipasi (Kamruzzaman, 2020). Pelatihan ini pun menjamin bahwa pendidikan politik tidak terjadi secara otomatis, melainkan didukung oleh program yang terencana

Elemen ketiga adalah penyusunan mekanisme akuntabilitas sosial dalam pengelolaan desa wisata, contohnya melalui keterbukaan anggaran, laporan kegiatan publik, serta audit sosial masyarakat. Transparansi terbukti memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung legitimasi pengelola seni. Dalam kajian *good governance*, mekanisme akuntabilitas adalah komponen krusial untuk memastikan bahwa partisipasi tidak sekadar simbolis, tetapi memiliki makna yang sebenarnya (Nurhidayat, 2023). Implementasi di Ponorogo dilaksanakan dalam rencana desa wisata agar masyarakat dapat mengawasi keberlanjutan pengelolaan Reog serta aset budaya lainnya.

Akhirnya, model partisipasi demokratis-edukatif yang dikembangkan dalam penelitian ini menggabungkan empat elemen inti: ruang deliberatif yang inklusif, peningkatan kapasitas politik masyarakat, mekanisme akuntabilitas sosial, dan integrasi nilai budaya lokal sebagai dasar pembelajaran politik. Model ini berfungsi tidak hanya sebagai saran praktis bagi desa wisata di Ponorogo, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual untuk studi pendidikan politik yang berbasis komunitas. Oleh karena itu, desa wisata sebagai ruang budaya tidak hanya dilihat sebagai destinasi wisata, melainkan sebagai tempat untuk mereproduksi nilai-nilai kewargaan, membangun kesadaran politik, dan memperkuat demokrasi lokal

SIMPULAN

Pengelolaan desa wisata yang berbasis budaya di Ponorogo berfungsi tidak hanya sebagai alat pelestarian warisan budaya dan penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai wadah penting pendidikan politik bagi warga melalui partisipasi mereka dalam musyawarah, pengambilan keputusan, koordinasi kegiatan budaya, dan evaluasi program wisata. Partisipasi ini menghasilkan berbagai indikator pendidikan

politik, seperti keterampilan berdebat, pemahaman hukum dan kewarganegaraan, kesadaran kritis terhadap distribusi kekuasaan, serta kemampuan kolaborasi antar aktor yang semuanya meningkatkan kapasitas warga sebagai subjek politik dalam pembangunan desa. Meski begitu, dinamika partisipasi tetap dipengaruhi oleh ketidaksetaraan akses dan tatanan kekuasaan setempat, sehingga penerapan pendidikan politik yang ada belum sepenuhnya demokratis dan adil. Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan forum dialog inklusif yang menciptakan ruang bagi kelompok marjinal, program peningkatan kapasitas politik warga yang terorganisir, dan mekanisme akuntabilitas sosial yang transparan agar pengelolaan warisan budaya dapat berjalan lebih adil, edukatif, dan demokratis; di samping itu, pemerintah desa, kelompok seni, dan pemangku kepentingan lainnya harus berkolaborasi dalam membangun model tata kelola budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip good governance untuk memperkuat desa wisata sebagai ruang pembelajaran politik berbasis komunitas

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. S., Wibowo, A., & Kartono, D. T. (2023). Model dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. *DEDIKASI PKM*, 4(3), 398. <https://doi.org/10.32493/DEDIKASIPKM.V4I3.32778>
- Argiandini, S. R., Sumarwati, S., & Suhita, R. (2023). Symbolic Meaning and Local Wisdom Education of the Traditional Performing Arts Reog Ponorogo. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS)*, 2(2), 83–96. <https://doi.org/10.59188/ICSS.V2I2.148>
- Atiek Rohmiyati, & Rachmawaty. (2023). Grebeg Suro di Bumi Reog Sebagai Destinasi Wisata yang Berkemajuan. *Journal Of Tourism And Economics*, 6(2). <https://doi.org/10.36594/jtec/e6v6n2a6>
- Dacombe, R., & Parvin, P. (2021). Participatory Democracy in an Age of Inequality. *Representation*, 57(2), 145–157. <https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1933151>
- Firman, F., Sumatono, S., Muluk, M. K., Setyowati, E., & Rahmawati, R. (2024). Enhancing Citizen Participation: The Key To Public Service Transparency. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2937. <https://doi.org/10.55908/SDGS.V12I1.2937>
- Hodriani, Pinem, W., Sutrisno, Safitri, I., & Bahauddin, N. A. binti B. (2025). Integrating Civic Engagement to Foster Soft Skills and Teacher Professionalism. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(2), 228–245. <https://doi.org/10.24114/JK.V22I2.66124>
- Huberman, A., & Miles, M. (2012). Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher's Companion*. <https://doi.org/10.4135/9781412986274.n2>
- Kamruzzaman, P. (2020). Exploring the Nexus Between Participation and Empowerment. *Journal of Development Policy and Practice*, 5(1), 32–53. <https://doi.org/10.1177/2455133320909926>
- Mahardhani, A. J. (2023). *Pemerintahan Kolaboratif (Menjawab Tantangan Masa Depan)*. Literasi Nusantara. <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/pemerintahan-kolaboratif-menjawab-tantangan-masa-depan/>
- Mahardhani, A. J., Zahroni, A., Hartanto, E. D., Nurlitasari, A., & Wirakusuma, Z. A. (2023). Analisis Pengembangan Potensi Wisata Desa Gajah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(2), 131–136. <https://doi.org/10.24036/JMIAP.V5I2.617>
- Maulana, M. M., Suchyo, I. R., Syaifudin, M., & Fatoni, A. F. (2024). Mneyelam ke Permukaan: Dinamika Reog Ponorogo dalam Balutan Politik, Ekonomi, dan Spiritual. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 507–521. <https://doi.org/10.51878/SOCIAL.V4I4.3383>
- Maulidy, A. M., Suharto, B., Ali, M., Gita, L. P., & Lestari, Q. (2023). Keberlanjutan Festival Nasional Reog Ponorogo: Analisis Perkembangan Saat Ini dan Potensi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 14(4). <https://jurnalhost.com/index.php/jrem/article/view/156>
- Nadlir, N., & Zamzami, M. R. (2023). Paulo Freire's View on Freedom to Learn Policy. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 5(1), 65–84. <https://doi.org/10.37680/SCAFFOLDING.V5I1.2260>

- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia . *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/E-GOV.V1I1.5>
- Kangei, L. O., Nyabul, P. O., & Muhenda, J. (2018). Habermasian Deliberative Democracy Nuance: An Enquiry. *True False*, 101–111. <https://doi.org/10.2307/J.CTT207G8BT.2>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Mahardhani, A. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Pramudiana, I. D., Suherman, E., Roekminiati, S., & Widyawati. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Pada Wisata Sontoh Laut Asemrowo Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(2), 85–101. <https://doi.org/10.38156/JISP.V4I2.254>
- Rahmi, W. (2024). Analytical Study of Experiential Learning: Experiential Learning Theory in Learning Activities. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 115–126. <https://doi.org/10.62775/EDUKASIA.V5I2.1113>
- Rohmiyati, A., & Rachmawaty. (2023). Grebeg Suro di Bumi Reog Sebagai Destinasi Wisata yang Berkemajuan. *Journal of Tourism and Economic*, 6(2), 207–219. <https://doi.org/10.36594/JTEC/E6V6N2A6>
- Sahri, W. F. (2021). Study Implementasi Kebijakan Bupati Ponorogo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.33061/JP.V10I1.5124>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2016). Theories of democratic network governance. In *Theories of Democratic Network Governance*. <https://doi.org/10.1057/9780230625006>
- Utami, P. S., Sulton, & Wulansari, B. Y. (2021). The Social Innovation of the Prototype of Local Culture of Wayang Golek Reyog Ponorogo. *Proceedings of the 1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)*, 581(Incesh), 294–299. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.211028.134>
- Varwell, S. (2022). A Literature Review of Arnstein’s Ladder of Citizen Participation. *Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 108–144. <https://doi.org/10.31273/EIRJ.V10I1.1156>
- Yanes, A., Zielinski, S., Cano, M. D., & Kim, S. Il. (2019). Community-Based Tourism in Developing Countries: A Framework for Policy Evaluation. *Sustainability* , 11(9), 2506. <https://doi.org/10.3390/SU11092506>
- Zarycki, T., Smoczyński, R., & Warczok, T. (2021). Cultural citizenship without state: historical roots of the modern Polish citizenship model. *Theory and Society* , 51(2), 269–301. <https://doi.org/10.1007/S11186-021-09465-X>